

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Sebagai Negara dengan ikatan sejarah yang kuat, Indonesia dan Jepang memiliki dinamika hubungan yang menarik, terutama pasca Perang Dunia II. Setelah memulai hubungan diplomatik bilateral pada 1958 dan menjadi mitra dagang selama 60 tahun, kerangka perdagangan antara kedua negara ini ditingkatkan ke tahap perdagangan bebas (Free Trade Area atau FTA) pada 2007 melalui IJEPA (Indonesian Japan Economic Partnership Agreement).¹ Perjanjian ini ditandatangani oleh presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007.² Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang dan prosedur kepabeanan.³

Neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang pada 2010 mencatat surplus untuk Indonesia sebesar US \$ 8,7 miliar. Angka surplus ini meningkat 8,9% dibandingkan dengan surplus perdagangan tahun 2009 yang tercatat US \$ 9,6 miliar. Pada 2010 total nilai perdagangan kedua negara mencapai US \$ 42,3 miliar. Indonesia mengekspor ke Jepang US \$ 25,5 miliar dan diimpor dari Jepang US \$ 16,8 miliar. Nilai perdagangan total meningkat 45,6% dibandingkan dengan

¹Kawasaki, Kenichi. 2003. "The Impact of Free Trade Agreements in Asia". Dalam : RIETI Discussion Paper Series 03-E-018.

²Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2018. Online dalam : <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/jepang> [Diakses 19 Desember 2019]

total perdagangan tahun 2009 sebesar US \$ 29 miliar. Sementara itu pada periode Januari-Oktober 2011, total perdagangan antara kedua negara mencapai US \$ 43,8 miliar, naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar US \$ 34,4 miliar. Nilai total perdagangan antara kedua negara menunjukkan sesuatu yang positif, di mana pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir (2006-2010) adalah 8,4%.⁴

Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian kerja sama bilateral untuk memperkuat kemitraan dan menghadapi era perdagangan dan pasar bebas. Dengan adanya IJEPA, ada langkah baru dalam hubungan Jepang dan Indonesia, yaitu pembentukan hubungan ekonomi melalui kerja sama bilateral dalam meningkatkan kapasitas liberalisasi, baik dalam layanan dan di bidang barang, promosi dan fasilitasi perdagangan, dan investasi antara kedua negara.⁵ Dari kerja sama yang dilakukan, telah terjadi peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Jepang yang tumbuh rata-rata 14,29% per tahun, menetapkan tarif IJEPA berdampak pada peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang sebesar 5,23%, yang

³Setiawan, Sigit. 2012. "Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang". Dalam : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Volume 17 No. 2. Hal.1

⁴ Setiawan, Sigit. 2012. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis" Vol 17 No. 2. Diterbitkan : Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma

⁵ Kementerian Perdagangan Internasional. "*Fact Sheet Indonesia-japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*".

Online dalam :http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf . [Diakses 18 Desember 2019]

berarti ekspor tumbuh 1,58 kali dibandingkan dengan tidak adanya skema tarif IJEPA.⁶

Beberapa alasan yang mendasari Indonesia menjalin kerjasama melalui IJEPA dengan Jepang diantaranya adalah Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama bagi Indonesia, dan Indonesia adalah penerima terbesar ODA Jepang.⁷ Akses Pasar untuk produksi Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil. Selain itu, IJEPA memberi kepastian akses pasar yang lebih preferensial dan luas dibandingkan dengan program seperti Generalized System of Preferences (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.⁸

Dari 13 sektor di IJEPA, ada 5 sektor yang tingkat implementasinya cukup baik (pengelasan, percetakan dan pemotongan logam, otomotif, elektronik, dan konservasi energi).⁹ Kerjasama IJEPA menyepakati tentang pemberian tarif yang menguntungkan dua belah pihak. Keistimewaan yang diberikan Jepang kepada

⁶ Setiawan, Sigit. 2012. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis" Vol 17 Art. 2. Diterbitkan : Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma

⁷ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. "Hubungan Perekonomian Indonesia - Jepang" Online dalam : https://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html [diakses 12 Desember 2019]

⁸ Dinamika Kerjasama Indonesia dan Jepang. Online dalam : <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12884/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> . [diakses 10 Desember 2019]

⁹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2013. "IJEPA Tak Berikan Manfaat Signifikan bagi Indonesia". Online dalam : <https://kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagiIndonesia>. [Diakses 10 Januari 2020]

Indonesia adalah perlakuan khusus tarif 93% dari jumlah tarif pada tahun 2006 yaitu 11.163 pos tarif.¹⁰

Kinerja perusahaan otomotif dinilai dalam menciptakan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsumen menginginkan merek, kualitas, harga serta dengan desain baru yang ditawarkan pada tingkat harga yang sesuai standart, hal ini yang harus difikirkan oleh para produsen untuk menciptakan kepuasan untuk konsumen. Berikut adalah data Nilai Impor Lima Komoditas Utama Indonesia dari Jepang, 2011-2014 dan data Besar Negara Suplier Mesin dan Peralatan Mekanis ke Indonesia, 2014 :

Tabel 1.1: Nilai Impor Lima Komoditas Utama Indonesia dari Jepang, 2008-2015 (dalam juta dolar AS)¹¹

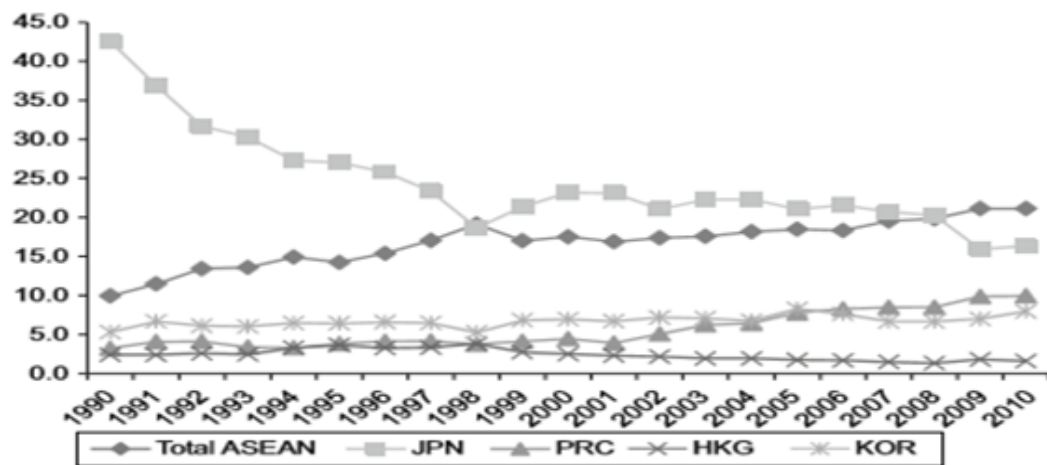
HS No.	Deskripsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
84	Mesin dan peralatan mekanis	5.227	4.722	4.987	5.887	6.855	5.736	5.180	5.215
87	Kendaraan dan bagiannya	2.971	1.958	2.900	2.169	2.848	2.199	1.811	5.419
72	Besi dan baja	1.690	854	1.102	1.934	2.137	2.109	1.776	1.203
85	Mesin dan peralatan listrik	8.120	8.020	10.373	2.072	2.221	1.843	1.675	8.562
73	Barang dari besi baja	1.400	1.141	1.468	794	1.270	890	791	2.007
	Total	19.408	16.695	20.830	12.856	153.331	12.777	11.233	22.406

¹⁰ Setiawan, Sigit. 2012. "Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang". Dalam : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Vol.17 No. 2. Hal.1

¹¹ Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. 2011. Online dalam : file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/IDA%201%20Maret%202011%20(1).pdf . [Diakses 20 Februari 2020]

Dalam perkembangannya IJEPA mengalami penurunan dibanding Tiongkok yang mengalami kenaikan sebagai rising economy di kawasan Asia. Sebagai bagian dari strategi bamboo network, Tiongkok dengan cepat meningkatkan investasi dan kehadiran mereka di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jika Jepang dan Indonesia memiliki IJEPA, maka Tiongkok memiliki ASEAN-Tiongkok Free Trade Area (ACFTA).¹² Perkembangan perdagangan yang dihasilkan oleh ACFTA juga tidak kalah signifikan dengan IJEPA karena terjadi peningkatan yang signifikan dalam perdagangan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dengan adanya ACFTA. Peningkatan tersebut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 1.1: Jumlah Ekspor Indonesia dengan ASEAN, Jepang, Tiongkok, Hongkong, dan Korea Selatan dari 1990-2010¹³



¹² Indonesia Go Id. 2019. Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA). Online dalam : <https://www.indonesia.go.id/layanan/perdagangan/ekonomi/tarif-preferensi-free-trade-agreement-fts> . [Diakses 15 Januari 2020]

¹³ Asih, Kiki Nindya, & Suksmonohadi Masagung. “Ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian”. Dalam : Artikel 1. Bab. 5. Online dalam : file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/8.Bab_5_Artikel.3.19.pdf . [Diakses 20 Februari 2020]

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa IJEPA sebagai kerangka perdagangan bebas antara Indonesia dan Jepang tidak menciptakan peningkatan yang signifikan dalam perdagangan bilateral mereka. Bahkan yang terjadi adalah adanya peningkatan ekspor dengan Tiongkok dan ASEAN yang konstan sejak tahun 2007, ketimbang dengan Jepang. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok lebih diperhitungkan oleh Indonesia sebagai mitra bilateral daripada Tiongkok.

Berkaitan dengan perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok, pada 2003 perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hanya sebesar 3,8 miliar dolar AS. Tetapi pada tahun 2010 jumlahnya berlipat ganda hampir 10 kali dan mencapai USD 36,1 miliar.¹⁴ Transformasi Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi utama pada abad ke-21 telah menyebabkan Tiongkok menjadi mitra utama perdagangan Indonesia, melampaui Jepang dan Amerika Serikat.¹⁵ Tiongkok juga merupakan sumber impor yang paling penting di Indonesia, mencapai USD 30,8 miliar, atau 22,7% impor Indonesia pada tahun 2016. Namun, neraca tersebut mendukung Tiongkok karena Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar USD 14 miliar pada tahun 2016.¹⁶

Sama dengan IJEPA, Tiongkok juga membiayai dan mengembangkan berbagai proyek infrastruktur di negara tersebut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terutama di sektor utilitas, transportasi, industri dan

¹⁴ Chandra, Alexander C. 2011. "*Indonesia – China Trade Relations : The deepening of economic integration amid uncertainty?*". Hal.2.

¹⁵ Kemlu. Sejarah Jepang. Online dalam : <https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx> [Diakses pada 17 Januari 2020]

¹⁶ Kementerian Republik Indonesia. "Kedutaan Besar Republik Indonesia Jepang di Tokyo, Jepang Merangkap Federasi Micronesia: kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi". Online dalam : <http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx> [Diakses 17 Januari 2020]

pariwisata, dengan aliran masuk bantuan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada akhir September 2015, Indonesia memberikan penghargaan proyek kereta api kecepatan tinggi Jakarta-Bandung bernilai miliaran dolar ke Tiongkok. Dikatakan bahwa tawaran Tiongkok untuk membangun jalur Jakarta-Bandung tanpa memerlukan jaminan pinjaman atau pendanaan dari Indonesia adalah titik balik dari keputusan Jakarta. Kereta berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung direncanakan untuk memulai operasinya ke publik pada 2019.¹⁷

Yang menarik, fakta tersebut tidak membuat Indonesia menghentikan kerjasama IJEPA dengan Jepang. Indonesia, melalui pernyataan Imam Pambagyo sebagai Direktur Jendral Perundingan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menghentikan IJEPA, dan tetap akan melanjutkan IJEPA dengan melakukan tinjauan ulang untuk sektor-sektor yang butuh untuk diperbaharui. Ini bisa dilihat dari Kementerian Perdagangan yang telah merapatkan dan tengah membangun revisi IJEPA yang akan diselesaikan pada 2018, dan sekaligus menunjukkan bahwa IJEPA akan terus berlanjut. Dari tinjauan ulang yang dilakukan, Kementerian Perdagangan telah memastikan akan meningkatkan kerjasama di bidang manufaktur, tenaga kesehatan, rantai suplai barang pokok, dan pengolahan produk pertanian dan perikanan.¹⁸ Dengan fakta tersebut, menarik kemudian untuk melihat apa yang mendasari Indonesia untuk tetap mempertahankan IJEPA, meskipun dalam hal perdagangan bilateral, Tiongkok

¹⁷ Tirto.id. 2015. Online dalam : "[Indonesia to award fast train contract to China - Japanese embassy official](#)". [Diakses 18 Januari 2015]

¹⁸ Kementerian Republik Indonesia. "Kedutaan Besar Republik Indonesia Jepang di Tokyo, Jepang Merangkap Federasi Micronesia: kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi". Online dalam : <http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx> [Diakses 17 Januari 2020]

telah melampaui Jepang sebagai mitra utama dalam aspek impor dan ekspor dengan Indonesia.

Dibidang perdagangan, IJEPA tidak memberikan manfaat yang optimal dimana ekspor Indonesia ke Jepang masih didominasi barang-barang mentah berbasis sumber daya alam. Kondisi ini berbeda dengan sebelum diberlakukannya IJEPA. Ekspor produk hasil industri yang bernilai tambah tinggi dari Indonesia sejauh ini belum tumbuh signifikan. Bahkan, tren ekspor Indonesia ke Jepang merosot rata-rata 6,6% pertahun. Sebaliknya, pertumbuhan impor Indonesia dari Jepang justru meningkat pesat dengan rata-rata 25% pertahun. Indonesia dinilai tidak mendapat keuntungan yang signifikan. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat (menjabat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa program tersebut tidak memberikan hasil yang optimal. Kerjasama yang sudah berjalan dengan pihak Jepang dianggap hanya menguntungkan Jepang dan merugikan Indonesia karena neraca perdagangan Indonesia selalu defisit setelah diberlakukannya kerjasama tersebut.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Indonesia memiliki mitra dagang yang lebih menguntungkan dari Jepang, seperti Tiongkok. Peneliti tertarik untuk menanyakan Mengapa Indonesia tetap mempertahankan kerjasama bilateral dengan Jepang melalui IJEPA pada tahun 2007 - 2018 ?

¹⁹ Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. "IJEPA Tak Berikan Manfaat Signifikan bagi Indonesia". Online dalam : <https://kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagi-Indonesia> [Diakses 18 Januari 2020]

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui alasan Indonesia mempertahankan kerjasama IJEPA, meskipun Tiongkok telah melampaui Jepang dalam aspek impor dan ekspor dengan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit, yaitu dengan 1) menyajikan data secara ilmiah melalui pengkajian teori yang diuji melalui data-data mengenai alasan Indonesia mempertahankan kerjasama IJEPA, meskipun Tiongkok telah melampaui Jepang dalam aspek impor dan ekspor dengan Indonesia., 2) hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi dasar untuk menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam ilmu hubungan internasional yang berkaitan dengan hubungan ekonomi bilateral.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1 Level of Analysis

Sebagai acuan ukuran sekaligus pembatas dalam proses analisis di bab-bab selanjutnya, penulis menggunakan Level of Analysis (LoA) sebagai salah satu teknik untuk membatasi data-data dan bahasan mengenai Indonesia dan IJEPA. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan LoA di tingkat negara. Sebagaimana definisi LoA tingkat negara, bahwa LoA negara memfokuskan diri kepada analisis

yang berkaitan dengan aktivitas dan tingkah laku suatu negara, yang menjadi penyebab suatu fenomena di tingkat internasional.²⁰ LoA tingkat negara memfokuskan pada kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tersebut.

Di tingkatan negara, pembuatan kebijakan luar negeri dianggap yang menentukan aksi negara. Negara adalah yang paling penting dari struktur, dan dengan menganalisis dampak struktur pada pembuatan kebijakan, analisis tingkat negara meningkatkan pemahaman kita tentang kebijakan.²¹ Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Rourke kemudian mengidentifikasi menjadi beberapa tipe yaitu, making foreign policy: type of government, situation and policy, making foreign policy: politic culture, dan foreign policy-making actors²². Dalam kaitan dengan penelitian ini, LoA difokuskan ke tindakan dan aksi Indonesia, berkaitan dengan alasan mereka mempertahankan kerjasama IJEPA dengan Jepang.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Rational Choice

Rational choice atau pilihan rasional pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia akan mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya dalam pengambilan setiap keputusan. Konsep rational choice merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari substansi kepentingan nasional, dimana peran seorang petinggi untuk merumuskan kepentingan nasionalnya tidak terlepas dari berbagai pertimbangan untung dan rugi dengan cara berfikir yang

²⁰Nau, Henry R. 2012. *"Perspectives on International Relations"*. Diterbitkan : New York. McGraw-Hill

²¹Marijke Breuning. 2007. *"Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction"*. Diterbitkan : New York. Palgrave Macmillan

rasional. Rational choice pada mulanya bersumber dari metodologi ekonomi mengenai pertimbangan akan untung rugi dengan tokohnya yang bernama James Buchanan, pemenang Nobel ilmu ekonomi, kemudian masuk dan diadopsi oleh beberapa wilayah keilmuan dan muncul sebagai perspektif yang dominan dalam ilmu politik.²³

Menurut J. Elster, intisari dari pilihan rasional adalah ketika individu dihadapkan pada beberapa jenis pilihan, individu tersebut akan memilih diantaranya yang diyakini baik dan akan mendatangkan keuntungan.²⁴ Tokoh lain yang menjelaskan rational choice datang dari tokoh bidang ilmu sosiologi yakni James S. Coleman. Coleman berpendapat bahwa untuk melihat problem makro, hal pertama yang dilakukan terlebih dulu adalah mengkaji problem mikro, dikarenakan problem mikro merupakan salah satu kajian yang pada akhirnya membawa individu pada problem makro.²⁵ Rational choice menggambarkan pola dimana orang-orang cenderung bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dimana tujuan tersebut dibentuk oleh pilihan-pilihan maupun nilai-nilai.²⁶

Terdapat dua unsur utama dalam rational choice yakni sumber daya dan aktor. Para aktor akan melakukan berbagai macam tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan manfaat serta segala sesuatu yang berkontribusi

²²Rourke, John T. "*Level of Analysis and Foreign Policy*". Chapter 3. Hal. 81

²³ Wirawan I.B. "*Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*". Dalam Jakarta. Kencana Perdana Media, hal.190

²⁴ Elster Jon. 1996. "*Rationally and the Emotions*". Dalam : The Economic Journal. Hal. 106

²⁵ James S. Coleman. 1994. "*Foundations of Social Theory*". Dalam : Belnap Press. Hal. 11

²⁶ *Ibid*

pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka.²⁷ Walaupun pada awalnya pilihan rasional mengacu pada tujuan yang dimaksud individu, setidaknya ada faktor yang memaksa tindakan yang mempengaruhi individu tersebut, antaranya :²⁸

- Keterbatasan sumber daya, dalam hal ini aktor satu dan lainnya memiliki sumber daya yang berbeda maupun akses yang berbeda ke sumber daya lain, jika semakin banyak sumber daya yang dimiliki maka akan semakin banyak kesempatan untuk individu mencapai tujuannya.
- Lembaga sosial, faktor kedua ini bisa berperan sebagai penghambat terhadap pencapaian suatu tujuan dikarenakan lembaga akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan aktor seperti memberikan sanksi dan sebagainya yang bisa menghambat atau bahkan menunjang tercapainya suatu tujuan.

Pendapat lainnya dalam mendeskripsikan rational choice datang dari Weber, menurutnya melakukan pilihan rasional merupakan bagian dari tindakan sosial. Tindakan rasional merupakan suatu tindakan yang dilakukan diatas kesadaran atas berbagai macam pertimbangan. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 jenis, antaranya :²⁹

- Rational Choice

²⁷ George Ritzer. 2012. "*Teori Sosiologi*". Dalam : Yogyakarta. Pustaka Pelajar

²⁸ Wirawan I.B. "*Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*". Dalam : Jakarta. Kencana Perdana Media. Hal.221

²⁹ Doyle P. Jhonson. 1998. "*Teori Sosial Moderen dan Klasik*". Dalam : Jakarta. PT. Gramedia Pustaka. Hal. 220

Pada tingkatan ini, tindakan rasional berorientasi pada segala macam pertimbangan dan pilihan yang menentukan sebuah tujuan dari tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dalam melakukan tindakan, individu sadar dan melalui proses penuh pertimbangan sebelumnya, dengan kata lain tindakan dilakukan dengan cara berfikir matang.

- Rasionalitas yang berorientasi nilai

Pada tingkatan ini, individu cenderung melihat alat-alat yang digunakan sebagai sebuah objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Dengan kata lain, suatu tindakan dilakukan karena mendahulukan nilai-nilai sosial serta kepentingan agama yang individu miliki.

- Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan refleksi perilaku seseorang yang disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan terdahulu, tanpa perencanaan dan pertimbangan.

- Tindakan Afektif

Tindakan ini didasari oleh emosional atau perasaan, tindakan yang diambil didominasi oleh perasaan tanpa dasar pertimbangan yang matang, cenderung tidak rasional dan spontan karena hal tersebut sebagai sebuah bentuk perwujudan ekspresi emosional individu.

Pendekatan pemecahan masalah yang rasional merujuk pada sesuatu yang ideal, yakni bagaimanakah membuat atau menciptakan suatu kebijakan luar negeri yang baik atau sesuatu yang ideal.³⁰ Pemaknaan ideal ini sebagai kemungkinan

³⁰ Antonius P. 2011. “*Studi Hubungan Internasional*”. Dalam : Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal. 72

yang dapat diterapkan kedalam beberapa situasi dan kondisi, maka dengan demikian dapat disimpulkan jika dasar tindakan politik internasional kontemporer terletak pada pola permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional.³¹

1.5.2.2 Integrasi Perdagangan

Perdagangan bebas adalah sebuah sistem di mana barang, modal, dan aliran tenaga kerja bebas berpindah antara negara-negara dengan tanpa hambatan. Banyak negara telah memiliki perjanjian perdagangan bebas, dan beberapa organisasi internasional mempromosikan perdagangan bebas antara anggota yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas mereka. Ada sejumlah argumen baik yang positif maupun negatif mengenai perdagangan bebas ini dari berbagai pihak seperti ekonom, politisi, industri, dan peneliti.³²

Perdagangan bebas adalah sebuah sistem di mana barang, modal, dan aliran tenaga kerja bebas berpindah antara negara-negara dengan tanpa hambatan. Banyak negara telah memiliki perjanjian perdagangan bebas, dan beberapa organisasi internasional mempromosikan perdagangan bebas antara anggota yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas mereka. Ada sejumlah argumen baik

³¹ *Ibid.* Hal. 73

³² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. "Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnersjip Agreement (IJEPA) Dalam Perdagangan Barang". Online : http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_review_IJEPA_dalam_Perdagangan_Barang.pdf. [Diakses : Juli 16 2020]

yang positif maupun negatif mengenai perdagangan bebas ini dari berbagai pihak seperti ekonom, politisi, industri, dan peneliti.³³

Beberapa argumen yang menentang perdagangan bebas berpendapat bahwa adanya perdagangan bebas bisa merugikan dan menyakitkan bagi produsen dalam negeri. Perdagangan bebas dianggap memaksa para produsen untuk menentukan harga barang produksinya supaya bisa bersaing dengan produk impor. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan tenaga kerja dan kualitas dari barang produksinya. Perdagangan bebas menciptakan kekhawatiran tentang keamanan produk makanan yang beredar di konsumen. Pedagangan bebas mendorong perusahaan melakukan operasinya di luar negeri yang memiliki tenaga kerja yang lebih murah dan sistem peraturan yang masih longgar untuk mendapatkan biaya produksi yang lebih kecil. Hal tersebut berpotensi merugikan suatu negara yang sistem peraturannya sudah sangat ketat.³⁴

Negara bisa memperoleh keuntungan dari masing masing produk barang dan jasa dengan memproduksi secara eksklusif dan baik untuk kepentingan konsumsi. Secara umum perdagangan bebas dapat diartikan suatu kebijakan pemerintah yang tidak mendiskriminasikan terhadap ekspor dan impor. Sebagian besar negara menganut perdagangan bebas termasuk anggota anggota WTO. Tetapi sebagian dari negara negara WTO masih memberlakukan kebijakan proteksionis yang mendukung para produsen lokal untuk melindungi tenaga kerjanya. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari perdagangan bebas yaitu

³³ *Ibid*

adanya kerjasama yang baik antara negara negara penganut kerjasama perdagangan bebas, selain itu juga dapat memperoleh barang barang yang tidak bisa diproduksi oleh negara yg tidak mempunyai kelebihan teknologi dalam memproduksi suatu barang dan jasa.³⁵

1.5.2.3. Kerjasama Bilateral

Salah satu wujud interaksi negara dalam sebuah sistem internasional adalah kerjasama. Secara umum, bentuk kerjasama negara dibagi menjadi dua, yaitu bilateral ketika melibatkan dua negara, dan multilateral ketika melibatkan lebih dari dua negara.³⁶ Dalam kerjasama bilateral, ada basis prinsip utama yang menjadi dasar negara mau melakukan kerjasama bilateral tersebut, dan ini disebut dengan istilah bilateral cooperation theory atau teori kerjasama bilateral. Tingkah laku strategis (strategic behavior) negara dalam kerjasama bilateral dilandasi oleh potensi keuntungan yang melimpah dan bersifat mutual yang menjadi hasil dari kerjasama bilateral tersebut. Melalui kerjasama bilateral, negara dapat memperoleh keuntungan ketika biaya transaksi rendah dan keuntungan yang didapat oleh tiap negara tinggi. Selain itu, membangun serangkaian kerjasama bilateral dengan negara-negara dapat secara efektif meningkatkan pengaruh negara, daripada kerjasama multilateral.³⁷

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

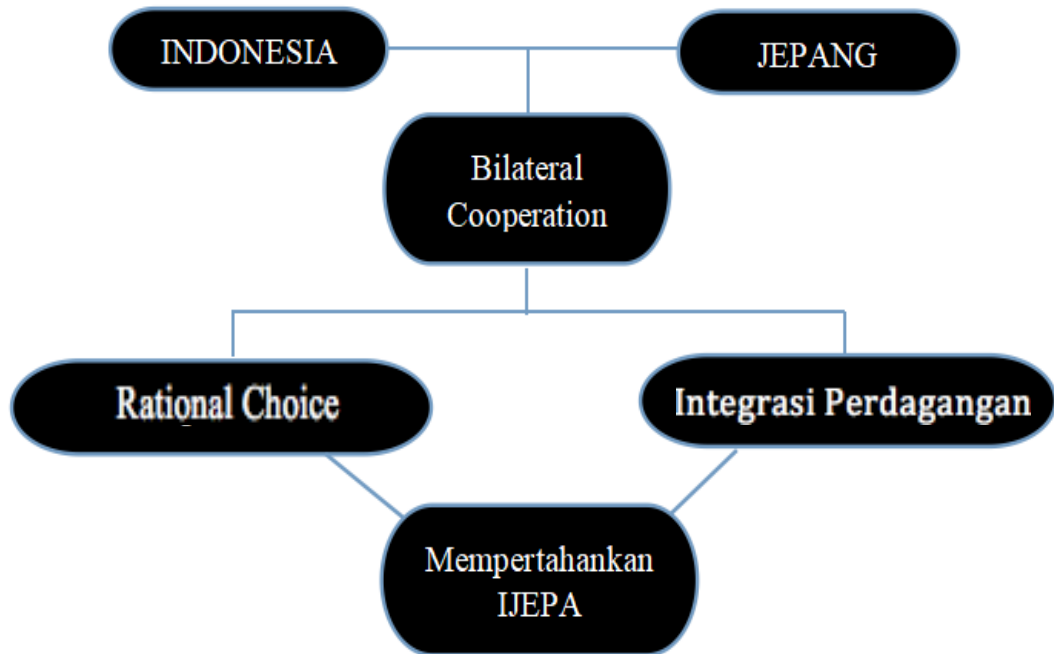
³⁶ Drs Supendi Haryadhi. 1990. "Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Kependudukan SMP Kelas 3". Hal. 18

³⁷ Parthiana, I Wayan. 2002. "Hukum Perjanjian Internasional". Diterbitkan : Bandung, Mandar Maju.

Konsep kerjasama bilateral dalam konteks ekonomi merepresentasikan hubungan antara aktor yang memiliki kepentingan berbeda, namun untuk tujuan memperoleh hasil yang bersifat mutual dan menguntungkan kedua, yang lebih baik daripada jumlah yang tunggal, melalui pencapaian, melalui banyak upaya dan berdasarkan kontrak, dari kegiatan yang terkait dengannya (di bidang produksi, penelitian, transfer teknologi, perdagangan dan jasa). Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral menurut Smith memfasilitasi pengurangan konflik dan penciptaan lingkungan yang stabil dengan secara tidak langsung meningkatkan rekonsiliasi politik, stabilitas dan kerja sama.³⁸

³⁸Frank, Flo & Anne Smith. 2002. *"The Partnership Handbook, Ministry of Publik and*

1.5.3. Sintesa Pemikiran



Dari bagan sintesa pemikiran yang dipaparkan di atas adalah penulis menggunakan tiga teori utama yaitu Rational Choice, kerjasama bilateral dan Perdagangan Internasional. Tiga teori utama ini digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Indonesia secara ekonomi menjalin kerjasama baik dengan Jepang melalui kerjasama bilateral IJEPA. Penulis menganalisis melalui teori Rational Choice, kerjasama bilateral dan. Rational Choice dalam hal ini berkaitan dengan pola aksi negara yang menitikberatkan pada kepentingan material dan keuntungan ekonomi, tanpa memandang prinsip ataupun pertimbangan non-material lain, sedangkan kerjasama bilateral berkaitan dengan bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang yang

Government Services, Canda. Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah". Diterbitkan : LAN, Jakarta 2004

bersifat bilateral, dan menitikberatkan pada pencarian keuntungan ekonomi secara mutual.

1.6. Hipotesis

Berdasarkan dari kerangka teoretik diatas, maka hipotesis yang muncul adalah terkait kerjasama bilateral melalui IJEPA antara Indonesia dan Jepang terus dilakukan karena Indonesia memberlakukan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai Rational Choice, dalam bidang ekonomi. Hal ini dijelaskan berdasarkan rational choice theory, dimana pengambilan keputusan diambil melewati 4 tahapan-tahapan pengambilan keputusan yaitu Problem Recognition and Definition, Goal selection, Identification of Alternatives dan Choice. Rasionalitas Indonesia dalam mengambil keputusan didasari pada kalkulasi untung ruginya. yang menekankan pada keuntungan ekonomi dan pembangunan negara, terlepas dari ideologi ataupun nilai-nilai non-material lainnya. Dengan kata lain, Indonesia tetap menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang, karena meskipun keuntungan dari kerjasamanya menurun, Indonesia tetap mendapat keuntungan material dari kerjasama tersebut, dalam bentuk investasi dan proyek pembangunan dari perusahaan-perusahaan dan pihak pemerintah Jepang. Dan disamping hal tersebut Indonesia melihat presentasi atau nilai perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang. Dengan mempertimbangkan unsur Rational Choice dan nilai Hubungan Perdagangan Internasional sehingga Indonesia tetap mempertahankan IJEPA.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual Dan Operasional

1.7.1.1. Kerjasama Ekonomi Internasional

Kerjasama Ekonomi Internasional didefinisikan oleh Gabriel Ciprian Andrusac dalam karyanya *Theoretical Perspectives on Economic Cooperation* sebagai kerjasama antara dua atau lebih negara yang berkaitan dengan pertukaran modal, barang, dan jasa melintasi perbatasan atau wilayah internasional. Di sebagian besar negara, perdagangan tersebut merupakan bagian signifikan dari produk domestik bruto (PDB).³⁹ Definisi lain datang dari Martin Feldstein dalam bukunya *International Economic Cooperation: Introduction* mendefinisikan kerjasama ekonomi internasional sebagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara yang terlibat dan telah meningkat dalam beberapa abad terakhir. Dalam kerjasama ekonomi internasional, Faktor-faktor seperti ekonomi, kebijakan pemerintah, pasar, hukum, sistem peradilan, mata uang, dll. mempengaruhi jalannya kerjasama tersebut. Hubungan politik antara dua negara juga mempengaruhi perdagangan di antara mereka.

Definisi operasional dari kerjasama ekonomi internasional adalah merujuk pada kerjasama ekonomi IJEPA yang dilakukan oleh Indonesia, baik dengan

Jepang melalui IJEPA, maupun dengan Tiongkok melalui ACTFA dan kerjasama bilateral, dalam bentuk investasi maupun bantuan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia ini diyakini merupakan salah satu upaya pembangunan ekonomi Indonesia, serta membangun kerjasama bilateral dengan Jepang dan Tiongkok.

1.7.1.2. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri didefinisikan oleh Steve Smith dan Tim Dunn dalam buku *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* sebagai strategi dan aksi yang dipilih oleh negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan hubungan internasionalnya.⁴⁰ Pendekatan ini secara strategis digunakan untuk berinteraksi dengan negara lain. Karena kepentingan nasional adalah yang terpenting, kebijakan luar negeri dirancang oleh pemerintah melalui proses pengambilan keputusan tingkat tinggi, yang melibatkan kepala negara dan menteri luar negeri. Pencapaian kepentingan nasional dapat terjadi sebagai hasil kerjasama damai dengan negara lain, atau melalui eksploitasi. George Modelski, dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Foreign Policy* mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai seperangkat sistem kegiatan yang berevolusi oleh masyarakat untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan lingkungan internasional.⁴¹ C.C. Rodee dalam buku *Introduction to The Foreign Policies of the Powers Political*

³⁹ Andrusac, Gabriel Ciprian, & Iulian Hertug. 2015. "*Theoretical perspectives on economic cooperation.*" Dalam *CES Working Papers*. Hal 675.

⁴⁰ Smith, Steve, Amelia Hadfield, & Timothy Dunne, eds. 2016. "*Foreign policy: theories, actors, cases*". Diterbitkan : Oxford University Press

Science mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perumusan dan penerapan sekelompok prinsip yang membentuk pola perilaku suatu negara ketika bernegosiasi dengan negara-negara lain untuk melindungi kepentingan nasional mereka.⁴²

Definisi operasional dari kebijakan luar negeri adalah merujuk pada kebijakan luar negeri Indonesia yang melandasi Indonesia untuk melakukan kerjasama IJEPA dengan Jepang. Kebijakan luar negeri ini dilihat dari Memorandum of Understanding (MoU), perjanjian dan surat-surat penjanjian kerjasama dalam aspek ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

1.7.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian ekplanatif yang berusaha menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan antara Jepang yang menjadi mitra perekonomian Indonesia dan Indonesia yang mempertahankan IJEPA dengan Jepang menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengungkapkan mengapa Indonesia mempertahankan IJEPA, faktor-faktor penyebab hal tersebut terjadi, dan di sisi lain, dampak dari aksi Indonesia tersebut terhadap perekonomian Indonesia dan Jepang.

⁴¹ Modelski, George. 1962. "*A theory of foreign policy*". Dalam : No. 2. Praeger for the Center of International Studies, Princeton University, .

⁴² Rodee, Carlton Clymer. 1976. "*Introduction to political science*". Dalam : McGraw-Hill Humanities, Social Sciences & World Languages.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai dari tahun 2007 saat IJEPA pertama kali ditandatangani dan berjalan, hingga 2018 ketika IJEPA direncanakan untuk diperbaharui.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah online, berita, artikel, dan laporan dari organisasi internasional.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berasal dari data-data kualitatif berupa fakta-fakta dan kejadian yang dipilih dari berbagai sumber berdasarkan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Teknik ini memiliki susunan empat bab dengan sistematika pembagiannya sebagai berikut :

BAB I merupakan bagian dari skripsi yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teorisasi, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II berisikan

gambaran umum tentang IJEPA dan dampaknya terhadap Indonesia dan Jepang. BAB III berisikan uraian mengenai Indonesia yang mempertahankan kerjasama IJEPA dengan Jepang. BAB IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.